

KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN KAUM BANGSAWAN DI INDONESIA (1900-1920)

Oleh:

Erwin Siregar, S.Pd.,M.Pd.

Program Studi Pendidikan Sejarah
STKIP Tapanuli Selatan Padangsidempuan

Abstract: *This research aims to know state of the implementation of the Dutch East Indies government ability in the field of education for the nobility Indonesia in 1900-1920. The method is the historical research methods. The collection data technique used documentation and literature study, while the analysis of the data used is analysis of qualitative data. The results showed that the Dutch East Indies Government's education policy is given to the Indonesian people are preferred for the nobility Bumiputera. Dutch East Indies government policy of education for the nobility in Indonesia is in the form of the establishment of school institution. School that established by the Dutch Government for the nobility in Indonesia, among which: ELS (Europese Lagere School) an elementary school Europe, HBS (Hogere Burger School) is a high school, HIS (Hollandse Inlandse School) an elementary school for the children of the people honored Bumiputera, dan OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) an elementary school.*

Keyword: *Ability, Education, Nobility*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan tiga aspek dalam diri seseorang dalam kehidupannya, yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk praktek pendidikan, pertama dimulai dari praktek pendidikan Hindu, pendidikan Budha, pendidikan Islam, pendidikan zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman pendudukan Jepang dan zaman setelah merdeka hingga sekarang, akan tetapi pendidikan Belanda yang sangat melekat di Indonesia, antara lain dari bentuk sekolah, kelas dan susunan tempat duduk, sangat persis dengan pendidikan Belanda dulu.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda pada awalnya hanya diterapkan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai Belanda beserta keluarganya yang memerlukan pendidikan dan latihan, baik mengenai pengetahuan umum maupun mengenai pengetahuan khusus tentang Indonesia (Sumarsono 1996: 11). Ini berarti pendidikan Barat hanya tersedia bagi pihak Belanda sendiri, yang kemudian memberikan kebijakan bagi golongan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa dan Barat serta anak-anak priyayi. Perkembangan pendidikan di Indonesia semakin mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900. Ketika Van Deventer menjabat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dan menerapkan sebuah kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis (Politik Balas Budi). Dengan motto "*de Eereschuld*" (hutang Kehormatan) dan slogan "*Educatie, Irrigate, Emigrate*" (Pendidikan, Irigasi, Emigrasi). Akan tetapi program politik etis ini ternyata menjadi program yang merugikan rakyat, karena pendidikan yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dasar pendidikan nasional bangsa

Indonesia seperti patriotisme, gotong royong, berdikari dan sebagainya (Ary Gunawan, 2006:19).

Sistem pendidikan Belanda diatur dengan sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya. Pendidikan yang diberikan dibedakan berdasarkan tiap-tiap golongan stratifikasi sosial. Pendidikan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda lebih diutamakan bagi para golongan bangsawan dan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat kolonial, pemerintah Belanda berpegangan pada penghasilan. Dengan perhitungan tertentu maka yang berpenghasilan di atas *f*l 1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang mempunyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia kepegawaian, ini berlaku bagi pangkat asisten wedana ke atas (Niel, 1997:34).

Sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda bagi kaum bangsawan di Indonesia salah satunya adalah *Europese Lagere School* (ELS) yang merupakan sekolah dasar Eropa yang pada dasarnya diperuntukan bagi keturunan Belanda yang kemudian memberikan kebijakan pada para keturunan raja untuk memasukinya, *Hollandse Inlandse School* (HIS) merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan bagi para bangsawan pribumi yang pada kenyataannya golongan rakyat biasa juga dapat memasuki sekolah ini, *Hogere Burger School* (HBS) merupakan sekolah menengah dan sekolah lanjutan bagi lulusan ELS dan *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) merupakan sekolah dasar yang disebut juga Sekolah Raja (Sumarsono 1996: 14)

Berbagai kebijakan pendidikan telah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda berupa pendirian lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaum bangsawan adalah orang-orang keturunan raja-raja dan aristokrat dalam sistem feodal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia pada masa kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1920.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia tahun 1900-1920. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yaitu: 1) *heuristik*, merupakan proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah, peneliti mencari sumber sejarah berupa buku-buku yang berhubungan dengan fokus penelitian, 2) kritik sumber, adalah penyaringan terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini kritik di bagi menjadi dua bagian yaitu kritik eksternal yaitu peneliti memeriksa kebenaran dan seleksi terhadap sumber sehingga peneliti dapat memastikan keaslian dari dokumen yang didapat, yang kedua kritik internal yaitu memilih sumber-sumber yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti, 3) interpretasi adalah pemberian penafsiran terhadap data-data yang diperoleh dan diurutkan sehingga menjadi sebuah urutan peristiwa yang dapat diterima akal sehat, dan 4) historiografi merupakan proses penyusunan secara menyeluruh dari hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan mengenai peristiwa sejarah yang diteliti secara sistematis (Helius Samsuddin, 2007:65).

Untuk mendukung kelancaran dalam penelitian ini dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, misalnya koran, naskah, majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1998:420).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak kedatangan Belanda sebagai penguasa politik di kepulauan Nusantara, berbagai kebijakan sebagai wujud bentuk imperialisme modern menampakkan dirinya sebagai kesatuan dalam seluruh aktivitas kolonial yang selalu berupaya menguasai seluruh wilayah kolonialnya secara sungguh-sungguh. Hasrat pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengeksploitasi daerah jajahan membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu,

timbul kebijakan dan usaha pemerintah kolonial untuk memperluas pendidikan dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga kerja murah yang terdidik. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian Barat yang ada di Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat Bumiputera yang bertujuan untuk mendidik tenaga terampil yang dapat dipekerjakan pada perusahaan dan berbagai bidang lainnya.

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan politik di negeri Belanda yang sangat berpengaruh pada politik pemerintahan Belanda di Indonesia. Perubahan politik ini memberi angin segar bagi peningkatan kesejahteraan orang pribumi sebagai tanggung jawab moral dari pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang pribumi. Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh seorang berkebangsaan Belanda, Van Deventer berjudul "Hutang Kehormatan" (*Een Eereschuld*) dalam majalah *De Gids*, yang berisi kerisauan kaum intelektual Belanda terhadap humanisasi Hindia Belanda yang telah terpengaruh kapitalisme. Munculnya artikel tersebut memicu perubahan yang sangat drastis pada kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk jajahan di Hindia Belanda, yaitu dengan dicanangkannya politik etis atau politik balas budi secara resmi pada tahun 1901 oleh Ratu Belanda (Niel, 1997:48).

Seiring dengan kebijakan politik etis, dalam kurun waktu 1900-1940 menunjukkan secara jelas bahwa sejak abad ke-20 telah terjadi arus balik dari pendidikan yang elitis menuju pendidikan yang lebih populis. Kebijakan pendidikan diarahkan pada pemberian kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan, sehingga perluasan besar-besaran jumlah sekolah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pembukaan sekolah tersebut kemudian juga membuka peluang untuk pembukaan sekolah-sekolah guru untuk penyediaan guru (Sumarsono, 1996: 60).

Pemerintah kolonial Belanda memiliki landasan prinsip pendidikan dimana pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu, tidak diusahakan untuk hidup selaras dengan lingkungannya tetapi lebih ditekankan agar anak didik dikemudian hari dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial. Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat pribumi. Pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia. Pembukaan sekolah pribumi dilakukan hanya sebatas kebutuhan praktis pemerintah Belanda. Sistem pendidikan yang dijalankan pun bersifat dualistik, dimana terdapat garis pemisah yang tajam antara dua subsistem, sistem sekolah Eropa dan sistem sekolah pribumi (Sumarsono 1996:93).

Secara teoritis tujuan pendirian persekolahan sangat baik, namun dalam prakteknya meskipun tidak secara langsung terdapat kecenderungan diskriminatif

dan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal cara penyingkapan anak sekolah. Caranya adalah dengan memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati-hati dalam memberikan pendidikan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi, walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah. Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan rendah yang tidak mempunyai wewenang dan pengaruh pada jabatannya.

Tabel 1
Perkembangan Sekolah Dasar dan Murid
Antara Tahun 1900-1920

Tahun	Sekolah Dasar	
	Sekolah	Murid
1900	1.584	188.000
1905	2.156	186.000
1910	4.540	334.000
1915	8.255	694.000
1920	12.494	866.000

Sumber: L.F. Van Gent dalam Sumarno

Mestoko. 1996. *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Hal 60

Politik etis dalam bidang pendidikan yang bertujuan menyejahterakan dan meningkatkan kecerdasan dan perbaikan hidup rakyat jajahan hanyalah kebohongan belaka. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan bagi kaum bangsawan dan sekolah untuk rakyat biasa. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak Bumiputera tidak direncanakan secara sistematis, segalanya berjalan berdasarkan keadaan zaman, kebutuhan dan kehendak kolonial. Tidak adanya persekolahan yang tetap dan selalu dengan ketidak stabilan dengan berbagai perubahan di dalamnya sehingga terkesan bahwa pemerintah Belanda tidak memiliki keseriusan dalam

menangani masalah pendidikan bagi bangsa Bumiputera, segalanya hanya sebagai percobaan dalam pemenuhan kebutuhan kepentingan Belanda.

Dalam suatu proses pendidikan pemerintah kolonial menggunakan kriteria tertentu agar memberikan hasil dan pencapaian yang baik dan sesuai dengan harapan dari pihak Belanda, sehingga menimbulkan berbagai kebijakan dalam pendidikan. Salah satunya kebijakan *gradualisme* dima untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak terlalu diperhatikan. Kebijakan lain adalah *Dualisme* yang diartikan berlaku dua sistem bagi golongan penduduk dan pendidikan dibuat terpisah. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung pada politik pendidikan. Pendidikan didirikan dengan tujuan untuk merekrut pegawai sebagai tenaga kerja yang murah. Selain itu, adanya prinsip konkordasi menyebabkan anak Indonesia tidak berhak bersekolah di pendidikan Belanda (Nasution. 1997:20).

Dalam pelaksanaan implementasi pendidikan, kebijakan pemerintah kolonial Belanda selalu berorientasi kepada menggolongkan stratifikasi masyarakat sesuai keturunan atau status sosial, anak didik diciptakan untuk dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial, sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, pembukaan sekolah-sekolah didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial atau pengusaha bukannya kebutuhan rakyat pribumi (Sumarsono 1996:87).

Sekolah-sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak keturunan bangsawan di Indonesia pada masa politik etis adalah ELS, HBS, HIS dan OSVIA. ELS (*Europese Lagere School*) merupakan Sekolah Dasar pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. ELS menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda yang dapat dimasuki oleh anak-anak keturunan Belanda dan anak-anak golongan bangsawan (anak raja) dengan lama belajar 7 tahun. ELS mulai berdiri pada tahun 1817 di Batavia (Jakarta). Nama *Europese Lagere School* sendiri baru dipakai pada tahun 1902 sebagai pengganti nama *Onderwijs een Lagere School voor Europeanen*.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah *Europese Lagere School*
(ELS)

Tahun	Jumlah Sekolah	Tahun	Jumlah Sekolah	Tahun	Jumlah Sekolah
1817	1	1890	144	1905	184
1820	7	1895	159	1910	191
1833	19	1900	169	1915	195
1858	57			1920	196

Sumber: S. Nasution. 1997. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Hal 91

Sebelum masuk ELS terdapat sekolah Taman Kanak-Kanak (*Frobel*). Selain itu juga ada sekolah untuk persiapan memasuki ELS (*Europese Lagere School*) bagi anak-anak bukan keturunan Eropa, agar anak-anak tersebut mendapat pelatihan berbicara Bahasa Belanda, sehingga pada saat masuk ELS mereka sudah mampu mengikuti kelas satu ELS yang menggunakan pengantar Bahasa Belanda. Batas usia masuk ELS anantara 6 sampai 16 tahun, tetapi khusus untuk anak Eropa dan anak-anak dari perkawinan campuran wanita Eropa dengan laki-laki Bumiputera dapat memasuki ELS sebelum usia 6 tahun, sedangkan anak-anak Bumiputera yang akan menjadi murid di ELS harus cukup usianya dan masih akan diseleksi. ELS sedianya diperuntukkan bagi orang Eropa dan mereka yang disamakan statusnya kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan Eropa yang membuka jalan bagi anak bumiputera untuk memasukinya. Anak-anak Indonesia tidak ditolak, selama jumlah anak bumiputera dalam jumlah yang kecil. Bahkan dianggap penting menerima anak-anak aristokrasi memasuki ELS untuk mempererat hubungan antar kedua bangsa. Akan tetapi penambahan anak bumiputera yang di luar batas dirasakan sebagai ancaman dan banyak alasan yang dikemukakan untuk membatasi penambahan penerimaan anak bumiputera selanjutnya.

Berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam membatasi jumlah anak Bumiputera yang semakin meningkat dalam memasuki sekolah ELS adalah seperti anak Indonesia tidak boleh melebihi usia 7 tahun agar dapat diterima (ini tidak berlaku bagi anak Belanda), penerimaan anak bukan keturunan Belanda jangan menyebabkan ditolaknya penerimaan anak keturunan Belanda karena kekurangan tempat, untuk bumiputera dikenakan pembayaran uang sekolah yang lebih mahal, anak bumiputera tidak boleh tinggal di kelas yang sama lebih dari dua tahun (Nasution, 1997:100).

Tabel 3
Jumlah Murid ELS (*Europese Lagere School*)

Tahun	Jumlah anak Belanda	Jumlah anak Indonesia	Jumlah seluruhnya	Presentase anak Indonesia
1890	11.421	808	12.377	6,5
1895	12.690	1.135	14.010	8,1
1900	13.592	1.545	15.462	10,0
1905	15.105	3.752	19.382	19,3
1910	17.526	3.453	24.514	14,0
1915	19.712	4.187	25.002	16,7
1919	20.703	5.285	27.315	19,2

Sumber: Data dari *Algemeen Verslag Europsch Onderwijs* 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1919 (Nasution, 1997: 104)

Proses penerimaan murid di ELS mempertimbangkan kedudukan orang tuanya, murid yang diperbolehkan memasuki ELS merupakan anak-anak dari keturunan bangsawan (priyayi). Maka dari data tersebut di atas merupakan jumlah keseluruhan anak

bangsawan yang masuk ke ELS. Kurikulum yang diberlakukan untuk ELS sebenarnya telah ditentukan pada peraturan tahun 1893 yang terdiri atas mata pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah, huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, mengukur tanah, menggambar dan semua pelajaran yang diajarkan di Sekolah Guru kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan setelah mendapat persetujuan dari inspektur atau pemimpin sekolah tersebut. Namun setelah memasuki abad ke-20 pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan di ELS dengan menyetujui penyebaran Bahasa Belanda dikalangan penduduk bumiputera terutama penyebaran dalam sistem pengajaran di sekolah ELS, dengan memberlakukan Bahasa Belanda sebagai mata pelajaran pokok. Dalam penyediaan tenaga pengajar dipilih guru-guru yang langsung didatangkan dari negeri Belanda. Pada tahun 1912 ELS mendapatkan kesulitan dalam penyediaan guru yang dapat berbahasa Belanda, untuk itu pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk melatih calon-calon guru dari penduduk Bumiputera yang nantinya akan dipekerjakan sebagai guru bantu di ELS.

Selama beberapa dekade ELS merupakan satu-satunya sekolah yang memberi persiapan untuk ujian pegawai rendah (*Klein Ambtenaar*) dan untuk melanjutkan pelajaran ke HBS (*Hogere Burger School*) dan seterusnya ke Sekolah Dokter Djawa dan OSVIA (sekolah pamong praja). ELS memberi jalan yang lebih terjamin dan pendek untuk kelanjutan pelajaran. Secara kualitas ELS selalu lebih tinggi daripada HIS dalam kenyataan pendidikan dan juga dalam mata para majikan. Standar akademis ELS sama dengan yang ada di Nederland, penguasaan bahasa Belanda jauh lebih tinggi karena banyak kesempatan menggunakannya dalam pergaulan antar murid. ELS adalah sekolah elit yang memberi prestis tinggi kepada anak dan orang tua. Demi itu orang tua anak Indonesia rela memberi pengorbanan finansial yang sebenarnya beban yang telampau berat untuk dipikul (Nasution. 1997:102-103).

Selain ELS (*Europese Lagere School*), terdapat juga HBS (*Hogere Burger School*) yang merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda bagi orang Eropa dan bagi golongan elit Bumiputera. Pada awalnya HBS bernama sekolah *Gymnasium* dengan masa belajar 3 tahun kemudian pada tahun 1867 nama *Gymnasium* diubah menjadi HBS (*Hogere Burger School*) dengan lama belajar 5 tahun. Pada tahun 1864 didirikan HBS pertama di Batavia, 1875 di Surabaya, 1877 di Semarang. HBS sedianya diperuntukkan bagi murid-murid Belanda dan golongan yang sanggup menyekolahkan anaknya ke ELS yang mengajarkan Bahasa Perancis sebagai syarat masuk HBS. Selama hampir seperempat abad HBS tidak menerima murid wanita. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya jumlah murid Bumiputera antara

lain sulitnya bagi anak Indonesia memasuki ELS “Kelas Satu” untuk mempelajari Bahasa Perancis dan ketidakmampuan membayar tingginya uang sekolah sebesar f-15.

HBS (*Hogere Burger School*) adalah satu-satunya sekolah yang dapat melanjutkan ke perguruan negeri Belanda. Kurikulum yang diberikan tidak berbeda dengan kurikulum yang ada di negeri Belanda tanpa ada perubahan dan dapat bertahan dari berbagai kritik, mata pelajaran yang diajarkan pun bersifat universal. Kurikulum yang diberikan di sekolah HBS sifatnya sangat seragam bagi semua. Kurikulumnya semata-mata mengikuti yang ada di Nederland dengan tidak menghiraukan keadaan di Indonesia. Untuk periode lebih dari setengah abad sekolah inilah satu-satunya yang memberikan jalan menuju ke perguruan tinggi di Belanda. Memasuki HBS dengan hasil yang baik merupakan kebanggaan tersendiri dimata masyarakat.

Tabel 4

Jumlah dan Persentase Murid HBS (*Hogere Burger School*)

Tahun	Jumlah Murid			Persentase		
	Belanda	Indonesia	Cina	Belanda	Indonesia	Cina
1900	622	13	4	97,4	2,0	0,6
1905	618	36	15	91,6	5,4	2,8
1910	819	50	60	88,1	5,4	6,5
1915	915	67	112	83,7	6,1	10,2

Sumber: Van der Wal, Hal 697 (Nasution, 1997: 135).

HIS (*Hollands Inlandse School*) merupakan Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat. Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Ada pula yang merasa keberatan karena adanya pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk menyelenggarakan sekolah ini sehingga mengurangi anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.

Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu dan pada tahun 1914 telah resmi bernama *Hollands Inlandse School*. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan

untuk menguasai keterampilan membaca yang pada umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian pegawai rendah (*Klein Ambtenaar Examen*), ini merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda yang memandang Indonesia dari segi pandangnya sendiri.

Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru Indonesia lulusan dari HKS (*Hogere Kweek School*). Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang mempunyai *Hoofdacte* atau ijazah Kepala Sekolah, akan tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah apabila memiliki H.A (*Hoofdacte*).

Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang termasuk golongan atas tersebut karena dalam pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS, akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai. Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan banyak diantara mereka yang berbakat intelektual kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka kesempatan bagi golongan swasta dan yang berpenghasilan rendah.

Tabel 5
Jumlah Murid HIS (*Hollands Inlandse School*)

Tahun	Jumlah Murid
1914	18.181
1916	20.737
1921	38.211

Sumber: Nasution. 1997. *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Hal 117)

Pada tahun 1916 populasi HIS seluruhnya berjumlah 20.737 diantaranya 3.338 atau 16% anak wanita dan kebanyakan dari golongan atas. Di Jawa maupun di pulau-pulau lain, kebanyakan gadis adalah anak pegawai. Di Jawa 77,7% anak wanita berasal dari golongan bangsawan dan di luar Jawa 59,1%. Pegawai pemerintah yang telah menerima pendidikan Barat, rupanya progresif dalam sikapnya untuk menyekolahkan anak-anak gadisnya.

OSVIA merupakan Sekolah Dasar yang disediakan bagi anak-anak golongan bangsawan. Sekolah ini pada mulanya didirikan di Tondano (1865-1872 sebagai percobaan) dan di Bandung, Magelang, dan Probolinggo (1878) yang dalam bahasa sehari-hari disebut Sekolah Raja (*Hoofdenschool*) dengan bahasa pengantar Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda, dan dimaksudkan untuk kepentingan administrasi pemerintahan Hindia Belanda bagi anak-anak tokoh terkemuka Bumiputera. Tetapi sekolah raja tersebut kemudian diintegrasikan ke ELS atau HIS. Pada tahun 1900 Sekolah Raja tersebut mengalami reorganisasi dan diberi nama OSVIA. Masalah keturunan merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan murid di OSVIA. Meskipun uang pembayaran sekolah disesuaikan dengan penghasilan orang tua, bagi keluarga berpenghasilan rendah yang menyekolahkan anaknya di OSVIA biaya tersebut dirasakan sangat mahal. Penerimaan siswa sering harus disertai surat rekomendasi pribadi pejabat *Binenlandsch Bestuur* (BB) dan para bupati. Sedangkan bupati-bupati tersebut menggunakan haknya untuk mengajukan sanak saudaranya dan orang-orang yang disukainya. Tingkat lanjutan dari sekolah OSVIA adalah MOSVIA atau *Middelbare Opleiding voor Indische Ambtenaren* (setingkat SMTA).

Pada dasarnya lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda selalu mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya begitu pula dengan jumlah murid yang memasuki sekolah-sekolah tersebut. kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap keturunan Bumiputera sangatlah tidak efisien. Keadaan seperti ini memang sengaja diciptakan dikarenakan pemerintah

Hindia Belanda berkeinginan agar orang-orang Bumiputera tidak menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Jadi kebijakan pendidikan bagi rakyat Bumiputera diselenggarakan secara sederhana dan kurang efisien karena pendidikan yang diberikan kepada rakyat jajahan hanya sebagai pemenuh kebutuhan kepentingan kolonial bukanlah untuk mencerdaskan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pribumi.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Pendidikan Bagi Kaum Bangsawan Di Indonesia Tahun 1900-1920, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia dalam bentuk mendirikan lembaga-lembaga sekolah, yaitu: *Europese Lagere School* (ELS), *Hogere Burger School* (HBS), *Hollands Inlandse School* (HIS), *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda khususnya mengenai pendidikan lebih diutamakan bagi para kaum bangsawan Bumiputera dengan tujuan Pemerintah Hindia Belanda ingin menciptakan kelompok elite yang terpisah dengan masyarakatnya sendiri. Para kaum bangsawan ini diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar menjadi pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan yang akan digunakan sebagai alat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk melangsungkan penjajahannya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary Gunawan. 2006. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Pendidikan Di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Balai Pustaka
- Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Robert Van Niel. 1997. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- S. Nasution. 1997. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarsono Mestoko. 1996. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.